

PENGARUH INVESTASI, DANA PERIMBANGAN DAN PAD TERHADAP KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI

¹Ni Putu Asri Diastari Putri

²Made Kembar Sri Budhi ³I Wayan Wenagama

^{1,2}Fakultas EkonomidanBisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Menjadi salah satu daerah tujuan wisata populer bagi wisatawan mendorong Provinsi Bali selalu mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam melihat kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam penelitian ini tertuang tujuan, yaitu untuk menganalisis pengaruh investasi, dana perimbangan dan PAD terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali; menganalisis pengaruh investasi, dana perimbangan dan PAD terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali; untuk menganalisis pengaruh investasi, dana perimbangan dan PAD terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder berlokasi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode tahun 2011-2017 dengan menggunakan teknik analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan dana perimbangan dan PAD berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, 2) investasi, dana perimbangan berpengaruh positif signifikan dan kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan PAD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, 3) Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kemiskinan, sedangkan investasi dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kemiskinan.

Kata kunci: investasi, dana perimbangan, PAD, kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.

ABSTRACT

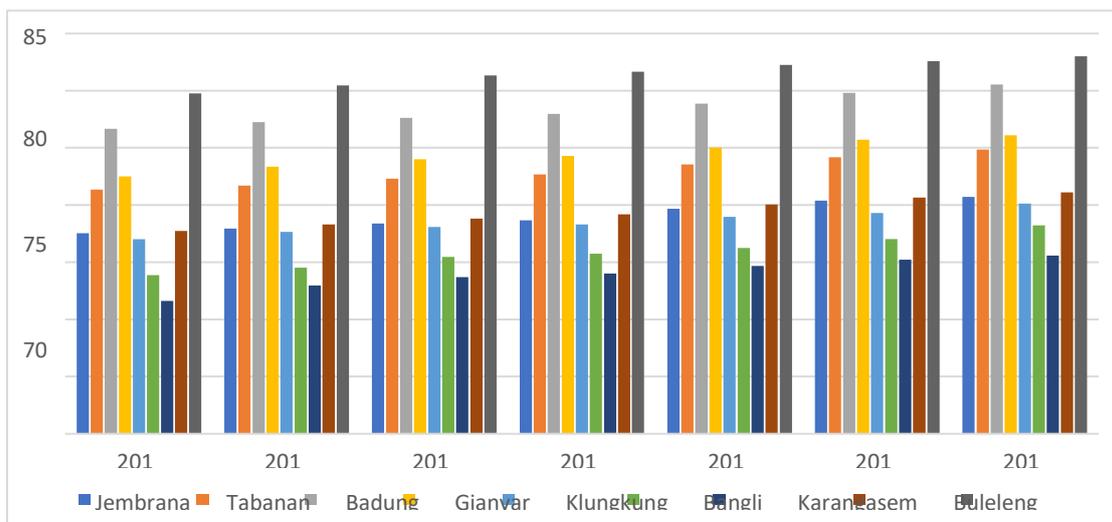
Being one of the popular tourist destinations for tourists encourages the Province of Bali to always strive for the public welfare. The public welfare of a region's people can be seen from the Human Development Index (HDI). The research objective to be analyze the effect of investment, balance fund, original regional income on poverty; analyze the influence of investment, balance fund, original regional income, and poverty on the welfare; and analyze the influence of investment, balance fund, original regional income through poverty on the welfare in the Regency/City in the Province of Bali. This study uses secondary data in the Regency / City Province of Bali in the period 2011-2017 with path analysis techniques. The results of analysis showed that, 1) investment has a negative and not significant effect on poverty, while the balance fund and PAD have a significant effect on poverty, 2) investment, the balance fund has a significant positive effect and poverty has a significant negative effect on community welfare, whereas PAD has no significant positive effect on community welfare, 3) income Native regions affect the welfare of the community through poverty, while investment and balance funds do not affect the welfare of the community through poverty.

Keywords: Investation, balance fund, original regional income, poverty, public welfare.

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan suatu program yang lahir sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi setelah pemberlakuan Millennium Development Goals (MDG's). Dalam konsep pengembangan SDG's terdapat tiga pilar indikator, yaitu: indikator yang melekat pada pembangunan manusia, kedua merupakan indikator yang melekat pada lingkungan kecil, ketiga merupakan indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar. Menurut Pisano (2015), terdapat tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus utama pada program ini yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Provinsi Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang begitu populer bagi wisatawan, sehingga hal tersebut mendorong pemerintah daerah untuk selalu berusaha keras mewujudkan segala kebijakan terutama yang menyangkut tentang kesejahteraan masyarakat. Pembangunan manusia melalui tingkat kesejahteraan sendiri menjelaskan mengenai penghapusan kondisi-kondisi yang membatasi kemampuan dan menolak kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial yang normal (Mahesha dan Shivalingappa, 2011). Kesejahteraan masyarakat menjadi tolok ukur dari keberhasilan pemerintah mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang diukur dengan indikator komposit yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup tiga aspek penting, yakni pendidikan, kesehatan, dan juga pengeluaran perkapita. Semakin tinggi tingkat Pendidikan akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik serta memperoleh pendapatan yang tinggi. Menurut Bassam (2013), hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pendapatan

yang baik dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses kesehatan yang layak. Kesehatan masyarakat yang rendah akan menyebabkan produktivitas yang rendah, sehingga produktivitas yang rendah ini akan menyebabkan pendapatan masyarakat juga rendah. Pendapatan masyarakat yang rendah tentunya akan menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga masyarakat tidak akan mampu untuk melakukan konsumsi sebagaimana mestinya. Selama ini pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya, pola pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat menyebabkan penurunan pada kesejahteraan masyarakat. *Human Development Index (HDI)* telah diterima secara luas sebagai ukuran perkembangan manusia. Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100 semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Dalam Pratowo (2013), menyatakan berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam tiga golongan, sebagai berikut: 1) $IPM < 50$ (rendah); 2) $50 \leq IPM < 80$ (sedang/menengah); 3) $IPM \geq 80$ (tinggi).



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2018.

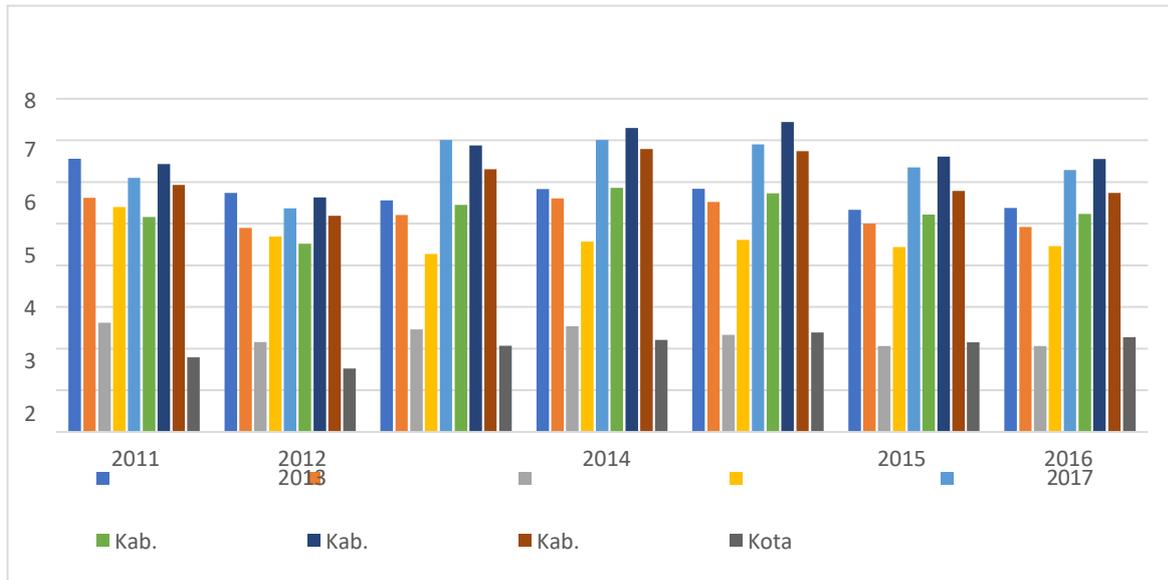
Gambar 1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2017 (dalam satuan poin)

Berdasarkan Gambar 1, dapat terlihat bahwa telah terjadi peningkatan angka IPM di masing-masing kabupaten/kota. Meskipun angka IPM cenderung mengalami peningkatan, akan tetapi pertumbuhan IPM masih mengalami fluktuasi selama periode 2011-2017, rata-rata pertumbuhan IPM cenderung masih rendah yakni dibawah 1 persen. Pertumbuhan IPM yang relatif masih kecil tersebut disebabkan karena terjadi disparitas tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah (Ali dkk, 2013). Tingkat Ketimpangan antar daerah yang diukur melalui IPM dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial yang merupakan suatu proses pertumbuhan di semua negara tanpa bisa mengidentifikasi dengan model pembangunan yang satu atau lainnya (Antonescu, 2010). Disparitas tersebut dapat terlihat pada Kawasan SARBAGITA dan Kawasan Non-SARBAGITA. Kawasan SARBAGITA memiliki IPM lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali. IPM tertinggi dimiliki oleh

Kota Denpasar sebesar 83,01 pada tahun 2017. Sebagai ibu kota provinsi sudah sewajarnya bahwa Kota Denpasar memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi karena segala pusat kesehatan, pendidikan dan ekonomi berada di Kota Denpasar. Sebaliknya, Kawasan Non-SABAGITA masih memiliki IPM yang berada di bawah angka IPM Provinsi. IPM terendah dimiliki oleh Kabupaten Karangasem sebesar 65,57 pada tahun 2017. Rendahnya angka IPM di Kabupaten Karangasem disebabkan oleh rendahnya daya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang menjadi indikator pembentuk IPM. Disparitas antar daerah telah menjadi fokus utama dalam kebijakan dan kepentingan pemerintah maupun masyarakat hingga saat ini (Irawan, 2015). Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan IPM pada suatu daerah. Berikut merupakan data anggaran pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari IPM.

IPM Provinsi Bali secara keseluruhan terus mengalami peningkatan, namun perbedaan angka IPM yang cukup jauh antara kabupaten/kota di Bali menjadi suatu masalah yang penting, hal tersebut menunjukkan terjadi ketidakmerataan antar daerah (Melliana dan Zain, 2013). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti (2012), faktor yang diduga berpengaruh terhadap IPM adalah jumlah penduduk miskin. Seseorang yang dikategorikan miskin akan mengeluarkan pendapatannya hanya untuk kebutuhan pokok pangan atau makanan saja dan akan mengabaikan kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga tidak akan merasakan kehidupan yang layak dan berdampak pada kesejahteraan (Sasana, 2009). Dalam penelitian Seran (2017), menyatakan orang miskin terjebak dalam sebuah

lingkaran yang tidak berujung pangkal yang disebut lingkaran setan (*vicious circle*). Chalid dan Yusuf (2014) yang memperoleh hasil bahwa kemiskinan memiliki korelasi yang negatif dengan angka IPM sebagai indikator yang digunakan dalam melihat kesejahteraan masyarakat. Tingginya tingkat disparitas dapat menyebabkan suatu wilayah terlihat miskin (Dao, 2013). Sri Budhi (2013) menyatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika tidak diiringi dengan adanya pemerataan pada kesejahteraan masyarakat akan menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan menjadi permasalahan serius bagi setiap pembangunan, sehingga harus segera ditangani. Pengentasan kemiskinan merupakan masalah utama yang menjadi tujuan SDG's. Ini berarti bahwa seluruh dunia telah bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh dunia, tidak terkecuali di Provinsi Bali (Ishartono dan Raharjo, 2016). Berikut merupakan grafik persentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode tahun 2011-2017.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2018.

Gambar 2 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2017 (dalam satuan persen)

Gambar 2 menunjukkan selama tujuh tahun terakhir yaitu tahun 2011-2017, persentase penduduk miskin tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 6,55 persen. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Karangasem, disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses lapangan kerja (Purba dan Aswitari, 2016). Untuk persentase penduduk miskin terendah 2,06 persen dimiliki oleh Kabupaten Badung. Rendahnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Badung disebabkan oleh perkembangan sektor pariwisata yang pesat sehingga masyarakat memiliki kesempatan kerja yang tinggi dan berdampak positif pada pendapatan yang diperolehnya. Sektor pariwisata memiliki hubungan negatif dan

signifikan terhadap persentase penduduk miskin hal tersebut dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Patera dan Suardana (2015). Persentase jumlah penduduk miskin yang sangat baik di Kabupaten Badung, seharusnya mencerminkan peningkatan pada IPM seperti penelitian Mirza (2012) yang menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara kemiskinan terhadap pembangunan manusia. Persentase penduduk miskin yang ada di Kabupaten Badung berdasarkan data pada gambar 1 dan gambar 2 dalam kurun waktu 2011- 2017, belum menunjukkan hubungan yang negatif terhadap tingkat kesejahteraan. Hal tersebut berarti persentase penduduk miskin yang rendah belum sejalan dengan peningkatan angka IPM yang terjadi.

Perbedaan karakteristik suatu daerah memiliki pengaruh yang besar dalam terciptanya pembangunan ekonomi yang tidak seragam. Ketidakseragaman ini menyebabkan suatu daerah mampu tumbuh cepat sementara daerah lainnya tumbuh lebih lambat, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan maupun hasilnya. Ketimpangan yang terjadi pada suatu daerah tentunya akan membawa pengaruh buruk pada kesejahteraan masyarakat. Breau dan Saillant (2016), menyatakan bahwa kemiskinan di suatu wilayah dapat disebabkan oleh perbedaan letak geografis seperti halnya disparitas yang terjadi antara daerah pedesaan dan perkotaan. *Multiplier efek* belum dapat dirasakan oleh daerah yang miskin meskipun disekitarnya sudah ada daerah yang menjadi pusat perkembangan perekonomian, perkembangan tersebut hanya menciptakan penyebaran pendapatan yang tidak merata. Dalam penelitian Endrayani (2016), diperoleh hasil bahwa investasi memiliki korelasi yang negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Sesuai teori investasi dapat memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki

kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi naiknya pendapatan yang diterima masyarakat (Sun'an dan Astuti, 2018). Yusuf dan Summer (2015) menyatakan, bahwa peningkatan investasi dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih bermanfaat kepada kaum miskin. Menurut Fleisher et al. (2010) menyatakan bahwa investasi dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan antar wilayah. Investor cenderung tertarik untuk berinvestasi pada daerah-daerah yang sudah dikategorikan maju karena terdapat kemudahan akses pada fasilitas-fasilitas tertentu. Tidak sedikit negara maju atau daerah maju memilih untuk berinvestasi pada sumber daya manusia dan juga teknologi (Kaur dan Singh, 2016). Potensi sumber daya alam yang menarik, kondisi lingkungan sekitar yang memadai seperti infrastruktur, pendidikan, serta angka korupsi yang rendah di suatu daerah berbeda di setiap provinsi menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya (Lindblad, 2015). Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan investasi karena investor tentu saja akan memilih wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan (Yeniwati, 2013).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam Otonomi Daerah memiliki tujuan untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan masyarakatnya, sehingga layanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan layanan masyarakat. Perimbangan keuangan pusat dan daerah memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal (Ogujiuba., *et al*, 2012). Pemerintah daerah pada hakekatnya memberikan kebebasan pada masyarakat di daerah untuk memilih cara-cara pengembangan daerahnya sesuai dengan potensi sumber daya

alam dan sumber daya manusia yang ada dengan melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku (Wiagustini, 2017). Salih (2012) menyatakan pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, hal ini merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan yang harus tepat sasaran. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya dengan cara mengefektifkan belanja pemerintah daerah dalam menunjang aktifitas perekonomian masyarakat seperti pembangunan sarana umum (Kusuma, 2016). Pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah dapat membantu proses pertumbuhan sehingga pemerintah berperan sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Dalamagas et al, 2010). Menurut Supriyadi, pemberian otonomi secara luas kepada daerah diarahkan untuk terwujud kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Fajri dkk, 2016). Otonomi daerah diharapkan akan mampu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam memproduksi dan menyediakan barang-barang publik. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, pemberian dana perimbangan memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap IPM sebagai indikator yang mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat (Suciati, 2015).

Disamping memaksimalkan penggunaan dana perimbangan, pemerintah daerah juga perlu memaksimalkan pengalokasian penerimaan daerah. Penerimaan Asli Daerah merupakan sumber utama pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Marliyanti (2014), peran pendapatan asli daerah (PAD) yaitu sebagai sumber

pendapatan dan pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pada penelitian Maesa Putra (2018), menyatakan bahwa PAD berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus mampu mengontrol proporsi belanja untuk dialokasikan lebih dalam belanja pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Setyowati dan Suparwati, 2012). PAD dapat menggambarkan seberapa besar kemandirian suatu daerah, dengan PAD yang tinggi diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pengaruh investasi, dana perimbangan, dan PAD secara langsung terhadap kemiskinan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali?; 2) Bagaimanakah pengaruh investasi, dana perimbangan, PAD, dan kemiskinan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali?; 3) Apakah investasi, dana perimbangan, dan PAD berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kemiskinan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali?

Dalam penelitian ini terdapat tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut: 1) Untuk menganalisis pengaruh investasi, dana perimbangan, dan PAD terhadap kemiskinan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali; 2) Untuk menganalisis pengaruh investasi, dana perimbangan, PAD, dan kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali; 3) Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung investasi, dana perimbangan, dan PAD terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kemiskinan antar Kabupaten/Kota di

Provinsi Bali.

Konsep penelitian ini menganalisis pengaruh investasi, dana perimbangan dan PAD terhadap kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan angka IPM dalam satuan poin. Variabel independent dalam penelitian ini adalah investasi yang masuk pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dana perimbangan yang dilimpahkan ke masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dan PAD sebagai pendapatan utama yang diperoleh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dalam penelitian ini juga digunakan variabel intervening yakni kemiskinan yang diukur dengan persentase penduduk miskin yang ada di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dalam upaya untuk memperkecil gap bagi kemiskinan yang memiliki implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat perlu adanya sinergi dari berbagai pihak, antara lain: pihak eksternal dan pihak internal. Dimana pihak eksternal dapat membantu sebuah daerah dalam mendorong pendapatan daerah dengan penanaman modal yang dilakukan investor. Terjadinya penanaman modal/investasi pada suatu daerah merupakan kewajiban bagi setiap daerahnya untuk mencari pendapatan lain yang dapat menunjang keberlangsungan hidup daerah tersebut. Sedangkan dari pihak internal yakni pemerintah melakukan upaya dengan menerapkan desentralisasi fiskal dengan memberikan suntikan dana yang diambil dari anggaran APBN. Dana tersebut berupa dana perimbangan yang memiliki fungsi untuk mencukupi segala fasilitas daerah tersebut. Selain dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah juga menjadi pendapatan utama daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah,

retribusi daerah, bagian lama usaha daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berdasarkan konsep penelitian ini dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 1) Investasi, dana perimbangan, dan PAD berpengaruh negatif terhadap kemiskinan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali; 2) Investasi, dana perimbangan, dan PAD berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali; 3) Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali; 4) Investasi, dana perimbangan, dan PAD berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kemiskinan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dengan alasan kesejahteraan masyarakat yang diprosikan dengan IPM masih mengalami ketimpangan antar Kabupaten/Kotanya. Pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang meliputi IPM, persentase penduduk miskin, investasi, dana perimbangan, dan PAD. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah teknik analisis jalur dengan menggunakan program SPSS. Tujuan penggunaan analisis ini adalah untuk mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung variabel eksogen dan variabel endogen melalui variabel mediasi. Pengaruh investasi, dana perimbangan dan PAD terhadap kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat diilustrasikan seperti Gambar 3. Berdasarkan Gambar 3 dapat dirumuskan dua

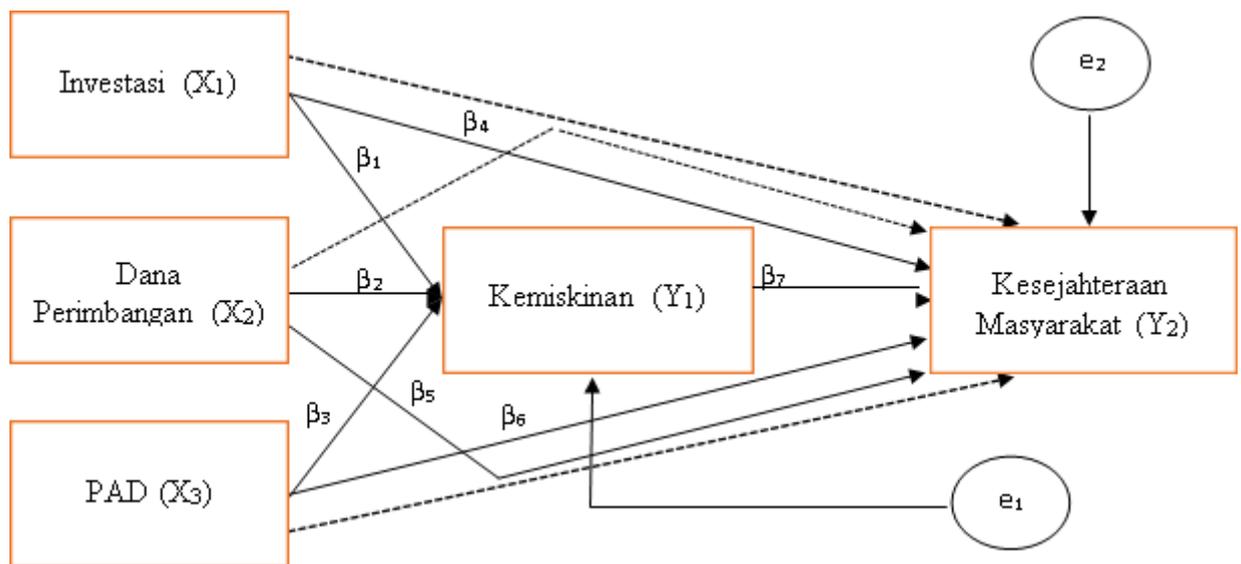
persamaan regresi yang menunjukkan hubungan antar variabel, yaitu.

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_1 \dots\dots\dots (1)$$

$$Y_2 = \beta_4 X_1 + \beta_5 X_2 + \beta_6 Y_1 + \beta_7 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

- Y₁ : Kemiskinan
- Y₂ : Kesejahteraan Masyarakat
- X₁ : Investasi
- X₂ : Dana perimbangan
- X₃ : PAD
- β_{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} : Koefisien regresi untuk masing-masing variable
- e_{1, 2} : Error (Variabel pengganggu)



Gambar 3 Kerangka Konseptual Penelitian Pengaruh Investasi, Dana Perimbangan dan PAD Terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Keterangan:

- β_{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} : Koefisien regresi dari masing-masing variabel
- e_{1, 2} : Variabel pengganggu (error)
- > : Pengaruh langsung antar variabel
- - - - -> : Pengaruh tidak langsung antar variabel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh investasi, dana perimbangan, dan PAD terhadap kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Koefisien jalur pada penelitian ini diperoleh dari hasil perhitungan regresi dengan menggunakan metode regresi sederhana (*Ordinary Least Square = OLS*) dengan menggunakan program SPSS terhadap model persamaan.

Tabel 1 Ringkasan Koefisien Jalur dan Signifikansi Hubungan Antarvariabel

Regresi	Koef. Reg. Standar	Std. Error	t Hitung	p Value	Keterangan
X1 → Y1	-0,074	0,110	-0,650	0,518	Tidak Signifikan
X2 → Y1	0,280	0,423	3,308	0,002	Signifikan
X3 → Y1	-0,683	0,156	-6,032	0,000	Signifikan
X1 → Y2	0,173	0,229	2,500	0,015	Signifikan
X2 → Y2	0,168	0,955	2,984	0,004	Signifikan
X3 → Y2	0,122	0,409	1,387	0,171	Tidak Signifikan
Y1 → Y2	-0,732	0,270	-9,225	0,000	Signifikan

Keterangan:

Y2 = Kesejahteraan Masyarakat
 Y1 = Kemiskinan
 X1 = Investasi
 X2 = Dana Perimbangan
 X3 = PAD

Pengaruh Langsung Variabel

Pengujian model 1 dilakukan untuk melihat pengaruh investasi, dana perimbangan dan PAD terhadap kemiskinan secara langsung yang dilakukan dengan menggunakan SPSS Versi 24.0. Model persamaan regresi 1 dapat disajikan sebagai berikut :

$$e1 = \sqrt{1-RR^2} = \sqrt{1-0,581} = 0,419$$

$$Y1 = -0,074X1 + 0,280 X2 + (-0,683) X3 + 0,419$$
$$Y1 = -0,074X1 + 0,280 X2 - 0,683 X3 + 0,419$$

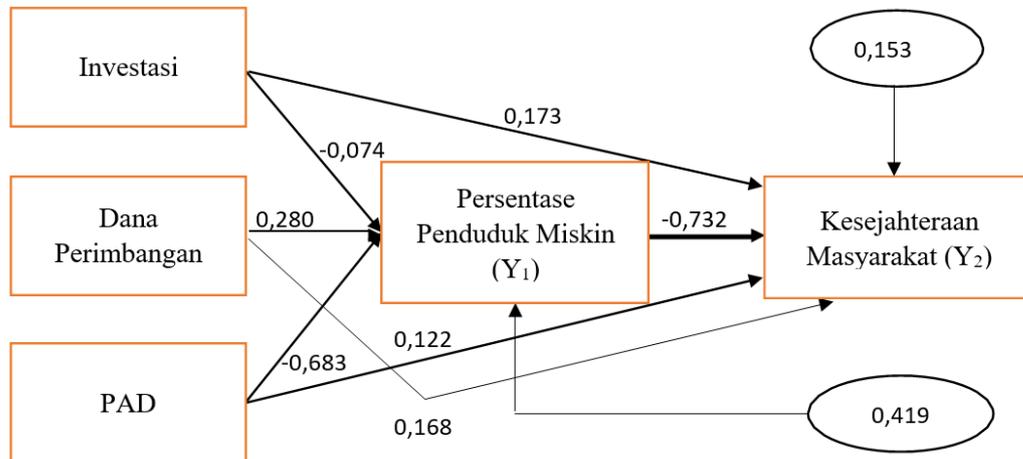
Pengujian model 2 dilakukan untuk melihat pengaruh investasi, dana perimbangan, PAD dan kemiskinan terhadap Kesejahteraan Masyarakat secara langsung yang dilakukan dengan menggunakan SPSS Versi 24.0. Model persamaan regresi 2 dapat disajikan sebagai berikut:

$$e2 = \sqrt{1-RR^2} = \sqrt{1-0,847} = 0,153$$

$$Y2 = 0,173X1 + 0,168X2 + 0,122X3 - 0,732Y1 + 0,153$$

Melalui ringkasan Tabel 1, maka dapat disajikan diagram hasil analisis

jalur sebagai berikut:



Gambar 4 Diagram hasil analisis jalur Pengaruh Investasi, Dana Perimbangan dan PAD Terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Berdasarkan ringkasan diagram hasil analisis jalur tersebut menunjukkan bahwa, hasil pengujian variabel investasi terhadap kemiskinan yaitu berpengaruh negatif dan tidak signifikan hal tersebut ditunjukkan melalui nilai signifikansi sebesar $0,518 > 0,05$ (nilai alpha). Hal ini berarti setiap kenaikan satu triliun rupiah investasi menyebabkan penurunan sebesar 0,074 persen pada kemiskinan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Paramita dan Purbadharmaja (2015), Endrayani dan Heny (2016), dan Momongan (2013). Dimana hubungan negatif variabel investasi terhadap kemiskinan tersebut memiliki arti apabila terjadi penurunan jumlah investasi akan menyebabkan peningkatan pada angka kemiskinan di suatu daerah. Hal tersebut terjadi karena investasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan dengan

memanfaatkan pihak eksternal yang ingin menanamkan modal di daerah tersebut. Hasil pengujian variabel dana perimbangan terhadap kemiskinan dengan signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ (nilai alpha), maka hal ini membuktikan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti setiap kenaikan satu triliun rupiah pada dana perimbangan menyebabkan peningkatan 0,280 persen pada kemiskinan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Paat dkk (2017) dan Widiyanto dkk (2016). Hal tersebut berarti pemberian dana perimbangan yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah belum sepenuhnya berhasil. Dalam penelitian ini diperoleh hubungan yang positif dan signifikan pengaruh dana perimbangan terhadap kemiskinan. Hal tersebut terjadi dikarenakan oleh pemberian dana perimbangan yang lebih besar pada suatu daerah akan menyebabkan peningkatan perbaikan infrastruktur pada daerah tersebut, sehingga akan mengundang masyarakat untuk datang dengan harapan dapat mendapati hidup yang lebih baik. Akan tetapi yang terjadi tidak sepenuhnya harapan masyarakat tersebut terpenuhi. Kerap kali membludaknya masyarakat pada suatu daerah akan meningkatkan angka kemiskinan, karena masyarakat yang datang tidak memiliki kompetensi untuk bertahan hidup, melainkan hanya mengandalkan sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah.

Hasil pengujian variabel PAD terhadap kemiskinan yaitu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan hal tersebut ditunjukkan melalui nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ (nilai alpha). Hal ini berarti setiap kenaikan satu triliun rupiah pada PAD menyebabkan penurunan 0,683 persen pada kemiskinan. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Paat dkk (2017) yang menyatakan

adanya hubungan yang negatif dan signifikan terhadap variabel PAD dan kemiskinan. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Musliadi (2013) dan Titisari (2012). Hubungan negatif pengaruh variabel PAD terhadap kemiskinan tersebut memiliki arti apabila terjadi penurunan terhadap PAD, maka akan meningkatkan kemiskinan pada suatu daerah. Seperti yang diketahui bahwa PAD merupakan sumber pendapatan utama daerah yang digunakan untuk memenuhi belanja pemerintah baik langsung dan tidak langsung guna memenuhi kebutuhan daerahnya.

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa hasil pengujian variabel investasi terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu berpengaruh positif dan signifikan hal tersebut ditunjukkan melalui nilai signifikansi sebesar $0,015 < 0,05$ (nilai alpha). Hal ini berarti setiap kenaikan satu triliun rupiah investasi menyebabkan peningkatan sebesar 0,173 persen pada kesejahteraan masyarakat. Wagner dan Dumairy (1997), menyatakan bila dalam perekonomian suatu negara terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akibat investasi maka akan diikuti dengan pengeluaran pemerintah yang relatif besar pula, sebagai sebab akibat dari campur tangan pemerintah dalam mengatur dampak kegiatan ekonomi (Wardani, 2018).

Hasil pengujian variabel dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu berpengaruh positif dan signifikan hal tersebut ditunjukkan melalui nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$ (nilai alpha). Hal ini berarti setiap kenaikan satu triliun rupiah dana perimbangan menyebabkan peningkatan sebesar 0,168 persen pada kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Mega dan Sutrisna (2018), Harahap (2011), yang menyatakan variabel

dana perimbangan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Swandewi (2016), pengaruh positif dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari otonomi fiskal yang ingin memperkecil ketimpangan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini berarti bahwa peningkatan pemberian dana perimbangan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia yang menjadi indikator penelitian kesejahteraan manusia.

Hasil pengujian variabel PAD terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu berpengaruh positif namun tidak signifikan hal tersebut ditunjukkan melalui nilai signifikansi sebesar $0,171 > 0,05$ (nilai alpha). Hal ini berarti setiap kenaikan satu triliun rupiah PAD menyebabkan peningkatan sebesar 0,122 persen pada kesejahteraan masyarakat. peningkatan pendapatan asli daerah akan menimbulkan eksternalitas yang positif dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sasana, 2009). Dalam penelitian ini ditemukan hasil penelitian hubungan variabel PAD dengan kesejahteraan masyarakat yang positif namun tidak signifikan. Pengaruh yang tidak signifikan tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya milik Suastika dan Mahaendra Yasa (2017), yang menyatakan bahwa variabel PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya prasarana publik yang harus diterapkan dan perlu diperhatikan pemerintah daerah kepada masyarakat, terutama yang menyangkut komponen dari IPM sebagai alat ukur kesejahteraan masyarakat.

Hasil pengujian variabel kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu berpengaruh negatif dan signifikan hal tersebut ditunjukkan melalui nilai signifikansi

sebesar $0,000 < 0,05$ (nilai alpha). Hal ini berarti setiap peningkatan satu persen pada kemiskinan menyebabkan penurunan sebesar 0,732 persen pada kesejahteraan masyarakat. Manusia yang hidup dibawah garis kemiskinan akan berada pada lingkaran setan. Masyarakat miskin yang berada dalam lingkaran setan akhirnya akan mengalami keterbelakangan dan buta huruf karena tidak terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang layak. Indikator IPM yang tidak terpenuhi yaitu meliputi pendidikan, kesehatan dan hidup layak, pada akhirnya akan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat (Chalid dan Yusuf, 2014).

Pengaruh Tidak Langsung

1) Pengaruh tidak langsung investasi terhadap kesejahteraan masyarakat antar kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui kemiskinan sebagai variabel intervening

i) Rumusan Hipotesis

$H_0: \beta_8 = 0$: kemiskinan (Y_1) tidak sebagai variabel intervening pengaruh investasi (X_1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2).

$H_1: \beta_8 \neq 0$: kemiskinan (Y_1) sebagai variabel intervening pengaruh investasi (X_1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2).

ii) Tingkat Signifikansi

$\alpha = 5\% (0,05)$

$z_{tabel} = 1,96$

iii) Kriteria Pengujian

Jika $z\text{-hitung} \leq 1,96$, maka H_0 diterima, yang berarti kemiskinan (Y_1) bukan merupakan variabel intervening.

Jika z hitung $> 1,96$, maka H_0 ditolak, yang berarti kemiskinan (Y_1) merupakan variabel intervening.

iv) Uji Statistik

a. Menentukan *Standar Error* Pengaruh Tidak Langsung

$$S_{\beta_1\beta_7} = \sqrt{\beta_7^2 s_{\beta_1}^2 + \beta_1^2 s_{\beta_7}^2}$$

$$S_{\beta_1\beta_7} = \sqrt{(-2,487)^2(0,110)^2 + (-0,072)^2(0,270)^2}$$

$$S_{\beta_1\beta_7} = 0,2742$$

b. Menghitung Nilai z -hitung

$$Z = \frac{\beta_1\beta_7}{S_{\beta_1\beta_7}}$$

$$Z = \frac{(-0,072)(-2,487)}{0,2742}$$

$$Z = 0,6528$$

v) Simpulan

Oleh karena z hitung sebesar 0,6528 lebih kecil dari 1,96 berarti kemiskinan bukan merupakan variabel intervening dalam hubungan variabel investasi dengan kesejahteraan masyarakat antar kabupaten/kota di Provinsi Bali.

2) Pengaruh tidak langsung dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat antar kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui kemiskinan sebagai variabel intervening

i) Rumusan Hipotesis

$H_0: \beta_9 = 0$: kemiskinan (Y_1) tidak sebagai variabel intervening pengaruh dana perimbangan (X_2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2).

$H_1: \beta_9 \neq 0$: kemiskinan (Y_1) sebagai variabel intervening pengaruh dana perimbangan (X_2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2).

ii) Tingkat Signifikansi

$$\alpha = 5\% (0,05)$$

$$z_{tabel} = 1,96$$

iii) Kriteria Pengujian

Jika z-hitung $\leq 1,96$, maka H_0 diterima, yang berarti kemiskinan (Y_1) bukan merupakan variabel intervening.

Jika z hitung $> 1,96$, maka H_0 ditolak, yang berarti kemiskinan (Y_1) merupakan variabel intervening.

iv) Uji Statistik

a) Menentukan *Standar Error* Pengaruh Tidak Langsung

$$S_{\beta_2\beta_7} = \sqrt{\beta_7^2 s_{\beta_2}^2 + \beta_2^2 s_{\beta_7}^2}$$

$$S_{\beta_2\beta_7} = \sqrt{(-2,487)^2(0,423)^2 + (1,401)^2(0,270)^2}$$

$$S_{\beta_2\beta_7} = 1,1179$$

b) Menghitung Nilai z-hitung

$$Z = \frac{\beta_2\beta_7}{S_{\beta_2\beta_7}}$$

$$Z = \frac{(1,401)(-2,487)}{1,1179}$$

$$Z = -3,1166$$

v) Simpulan

Oleh karena z hitung sebesar -3,1166 lebih kecil dari 1,96, serta mempertimbangkan nilai *Standardized Coefficients Beta* dana perimbangan terhadap kemiskinan sebesar 0,280 lebih besar dibandingkan dengan *Standardized Coefficients Beta* dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,168, berarti kemiskinan merupakan variabel intervening dalam hubungan variabel dana perimbangan dengan kesejahteraan masyarakat antar kabupaten/kota di Provinsi Bali.

3) Pengaruh tidak langsung PAD terhadap kesejahteraan masyarakat antar kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui kemiskinan sebagai variabel intervening

i) Rumusan Hipotesis

$H_0: \beta_{10} = 0$: kemiskinan (Y_1) tidak sebagai variabel intervening pengaruh PAD (X_3) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2).

$H_1: \beta_{10} \neq 0$: kemiskinan (Y_1) sebagai variabel intervening pengaruh PAD (X_3) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2).

ii) Tingkat Signifikansi

$$\alpha = 5\% (0,05)$$

$$z_{tabel} = 1,96$$

iii) Kriteria Pengujian

Jika $z\text{-hitung} \leq z\text{-tabel}$, maka H_0 diterima, yang berarti kemiskinan (Y_1) bukan merupakan variabel intervening.

Jika $z\text{ hitung} > z\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak, yang berarti kemiskinan (Y_1) merupakan variabel intervening.

iv) Uji Statistik

a) Menentukan *Standar Error* Pengaruh Tidak Langsung

$$S_{\beta_3\beta_7} = \sqrt{\beta_7^2 s_{\beta_3}^2 + \beta_3^2 s_{\beta_7}^2}$$

$$S_{\beta_3\beta_7} = \sqrt{(-2,487)^2(0,156)^2 + (-0,938)^2(0,270)^2}$$

$$S_{\beta_3\beta_7} = 0,4633$$

b) Menghitung Nilai z-hitung

$$Z = \frac{\beta_3\beta_7}{S_{\beta_3\beta_7}}$$

$$Z = \frac{(-0,938)(-2,487)}{0,4633}$$

$$Z = 5,0350$$

c) Simpulan

Oleh karena z hitung sebesar 5,0350 lebih besar dari 1,96 berarti kemiskinan merupakan variabel intervening dalam hubungan variabel PAD dengan kesejahteraan masyarakat antar kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Implikasi Hasil Penelitian

Dalam pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan

pembangunan manusia. Pembangunan manusia adalah suatu usaha dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pembangunan manusia memiliki makna lebih dalam yaitu, sebagai kondisi dan tingkat kemajuan kehidupan manusia yang diukur dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kesejahteraan masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah investasi (PMDN dan PMA), dana perimbangan, PAD, dan persentase penduduk miskin.

Keterkaitan antara investasi, dana perimbangan dan PAD dengan tingkat kesejahteraan masyarakat sangat erat. Ketimpangan kesejahteraan yang terjadi antar kabupaten/kota di Provinsi Bali disebabkan oleh masih timpangnya pendapatan yang diterima oleh masing-masing daerah, sehingga setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam menarik investor, kesenjangan pembangunan infrastruktur pada masing-masing daerah menjadi salah satu faktor pendorong lemahnya investasi di beberapa kabupaten di Provinsi Bali, sehingga investor hanya akan memusatkan penanaman modal di satu daerah yang kemudian akan menyebabkan terjadinya ketimpangan investasi yang berujung pada tingginya angka kemiskinan yang akan menurunkan angka kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Dalam Upaya mengurangi ketimpangan kesejahteraan yang terjadi diberlakukanlah Otonomi Daerah. Otonomi Daerah menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memberikan tanggungjawab bagi kepada daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. Bentuk otonomi daerah di Indonesia salah satunya dapat dilihat dari pengalokasian dana perimbangan yang bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian dana perimbangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah seharusnya sangat membantu dalam mengikis adanya ketimpangan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian dana perimbangan tersebut berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, pengalokasian dana perimbangan tersebut disesuaikan kembali dengan kebutuhan atau celah fiskal yang terdapat di daerah.

Selain upaya dari pihak luar dan pemerintah pusat dalam mengurangi ketimpangan kesejahteraan yang terjadi, pemerintah daerah juga perlu mengalokasikan dengan maksimal pengalokasian pendapatan asli daerah sehingga tepat sasaran sesuai dengan sector potensial daerah tersebut. Ketimpangan yang terjadi di kabupaten/kota Provinsi Bali masih sangat terlihat hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dan sumber pendapatan secara maksimal (Breau, 2016). Kemampuan yang berbeda tersebut memberikan dampak pada perbedaan kemampuan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang baik dan kesehatan yang merupakan indikator utama kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik tiga kesimpulan, yaitu:

- 1) Investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dana perimbangan memiliki hubungan positif dan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang negatif namun

signifikan terhadap kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali.

- 2) Investasi dan dana perimbangan memiliki hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat antar kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat antar kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sedangkan kemiskinan yang diukur dengan persentase penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat antar kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 3) Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui persentase penduduk miskin, sedangkan investasi dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui persentase penduduk miskin antar kabupaten/kota di Provinsi Bali.

SARAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan pemaparan simpulan di atas antara lain:

- 1) Disarankan untuk meningkatkan investasi peran pemerintah untuk dapat mengupayakan penyebaran investasi secara merata di seluruh wilayah Provinsi Bali, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan disparitas tingkat kesejahteraan masyarakat.
- 2) Disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan pembangunan prasarana publik, serta pemerintah daerah perlu lebih memberikan perhatian kepada masyarakat mengenai indikator-indikator kesejahteraan masyarakat, seperti: angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan

pengeluaran perkapita masyarakatnya. Pemerintah daerah lebih selektif dalam mengelola pajak dan retribusi agar pengalokasian pendapatan asli daerah tersebut dapat terdistribusi dengan optimal, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

REFERENSI

Ali, Hasnah, Er, A.C., Ahmad, A.R., Lyndon, N., Ahmad, Sanep. (2013). *Analysis of the Impact of Foreign Investment on Regional Disparities: A Case of Malaysia*. *Asian Sosial Science*. 9(14). Halaman: 209-218.

Antonescu, Daniela. (2010). The Analysis of Regional Disparities in Romania with Gini/Struck Coefficients of Concentration. *Scientific Researcher*, 2(40). Halaman:161-183.

Bassam A. AlBassam. (2013). *The Relationship Between Governance and Economic Growth During Times of Crisis*. *European Journal of Sustainable Development*. 2(4). Hal: 1-18.

Breau, Sebastien Richard Saillant. (2016). *Regional Income Disparities in Canada: Exploring the Geographical Dimensions of an Old Debate*. *Journal Regional Studies, regional Science*, 3, 461-481.

Chalid, Nursiah dan Yusbar Yusuf. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*. 22(2). Halaman: 1-12.

Dalamagas, Basil. (2010). Publik Sector and Economic Growth: The Greek Experience. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 32. Hal: 277-288.

Dao, Minh Quang. (2013). *Factor Endowment, Human Capital, and Inequality in Developing Countries*. *Journal of Economic Studies*, 40(1), hal. 98-106. USA: Eastern Illinois Univesrsity.

Endrayani, Ni Ketut Eni dan Made Heny Urmila Dewi. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas 5.1* (2016): 63-88.

Fajri, Muhammad. Arman Delis. Yohanes Vyn Amzar. (2016). Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*,

9(2), hal. 99-107.

Fleisher B, Haizheng Li. Dan Min Qiang Zhao. (2010). *Human Capital, Economic Growth, and Regional Inequality in China*. Journal of Development Economics, Department of Economics, Ohio State University, Columbus, OH 43210, United States. No. 17.

Harahap, Riva Ubar. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab/Kota Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 11 No.1.

Irawan, Andi. (2015). *Regional Income Disparities in Indonesia: Measurements, Convergence Process, and Decentralisation*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(1): 148-149.

Ishartono dan Santoso Tri Raharjo. (2016). *Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan*. *Social Work Journal*. 6 (2). Halaman: 154-272.

Kaur, Manjinder dan Singh Lakhwinder. (2016). *Knowledge in the Economic Growth of Developing Economies*. *Journal of Science, Technology, Innovation, and Development*, 8 (2), hal. 205-212.

Kementerian Dalam Negeri RI. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Kementerian Dalam Negeri RI. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kusuma, Hendra. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9 (1): 1-11. Vol. 9 no. 1.

Lindblad, J. Thomas. (2015). *Foreign Direct Investment in Indonesia: Fifty Years of Discourse*. *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, 51 (2), hal. 217-273.

Maesa Eka Putra, Pande Putu. (2018). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.

Pengaruh Investasi, Dana[Ni Putu Asri Diastari P., Made Kembar Sri Budhi]

Mahesha, Dr. D., Shivalingappa, Dr. B.N. (2011). *Regional Disparities of Human Resource Development in South India*. E-International Scientific Research Journal, Vol. 3(4). Hal. 299-306.

Marliyanti, Dwi Sudi. (2014). Pengaruh PDRB Terhadap Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 3, No. 6.

Melliana, Ayunandan dan Ismaini Zain. (2013). Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains dan Seni Pomits*, 2(2). Halaman: 237-242.

Mirza, Denni Sulistio. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*. 1(1). Halaman: 102-113.

Momongan, Junaidi E. (2013). Investasi PMA dan PMDN Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Vol. 1 No. 3 September 2013, Hal: 530-539.

Musliadi. (2013). Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2008-2012. Yogyakarta: Tesis Universitas Gajah Mada.

Ogujiuba, Kanayo and Abraham, Terfa W. (2012). Testing the Relationship between Government Revenue and Expenditure: Evidence from Nigeria. *International Journal of Economics Finance*. 4(11). Hal: 172-182.

Paat, Dewi Chrisanty, dkk. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 19, No. 1 (2017).

Paramita, Anak Agung Istri Diah dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. (2015). Pengaruh Investasi dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan EKonomi Serta Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(10): 1194-1218.

Patera dan Suardana. (2015). Model Hubungan Pariwisata, Kinerja Perekonomian dan Kemiskinan Di Kabupaten Badung, Bali. *Piramida Unud*. 11(2). Halaman: 95-105.

- Pisano, Umberto., LisaLange, Gerald Berger and Markus Hametner. (2015). *The Sustainable Development Goals (SDGs) and Their Impacton The European SDGovernance Framework. ESDN Quarterly Report, No.35.*
- Purba, Yofa Selvida Theresia dan Aswitari. (2016). Pengaruh Peran Sektor Non-Pertanian, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Kesempatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan. *E-Jurnal EP UNUD*. 5 (7). Halaman : 799-824.
- Rosita, Ida Ayu Putu Mega dan I Ketut Sutrisna. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 7(7): 1445-1471.
- Salih, Mohame Abdel Rahman. (2012). The Relationship Between Economic Growth and Government Expenditure: Evidance from Sunda. *International Business Research*. 5(8). Hal: 40-46.
- Sasana, Hadi. (2009). Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 16 (1), pp: 50-69.
- Seran, SriIlius. (2017). Hubungan antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 10(2). Halaman: 59-71.
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiri pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). *Jurnal Prestasi*. 9(1).
- Sri Budhi, Made Kembar. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Berengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali. Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6(1), hal. 1-6.
- Suastika, I Gede Yoga dan I Nyoman Mahaendra Yasa. (2017). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal Wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E- Jurnal EP*, 6(7): 1332-1363.
- Suciati, Desak Ayu Putu. Made Kembar Sri Budhi dan Ketut Jayastra. (2015). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Investasi pada Kesejahteraan Masyarakat melalui Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2012. *Buletin Studi Ekonomi*. 20(2).

Sun'an, Muammil dan Endang Astuti. (2008). Analisis Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja di Propinsi Nusa Tenggara Barat. *Iqtishoduna Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 4, No. 1.

Swandewi, Anak Agung Istri Agung. (2014). Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuanga Daerah terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 3.7 (2014): 356-376.

Titisari, E. W. (2012). Analisis Pendidikan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan Pada Era Otonomi Daerah Di Jawa Tengah Pada Tahun 2007-2009.

Wardani, Putu Ratih Oka. (2018). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Metropolitan Sarbagita. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.

Wiagustini, Ni Luh Putu, dkk. (2017). Potensi Pengembangan Investasi Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 2(10).

Widianto, Andri, dkk. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Tegal). *E-Jurnal Politeknik Harapan Bersama Tegal*, Vol. 5, No. 2 (2016).

Widyastuti, Astriana. (2012). Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009. *Economic Development Analysis Journal*. 1(2). Halaman: 1-11.

Yeniwati. (2013). Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi di Sumatera. *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol.

II, No. 03.

Yusuf, Arief Anshory & Andy Summer. (2015). *Growth, Poverty, and Inequality under Jokowi*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(3): 323-48.